

ASIMILASI, AKULTURASI, DAN INTEGRASI NASIONAL

*Hari Poerwanto**

1. Pendahuluan

Sejak lama, para ahli antropologi tertarik pada peristiwa pertemuan dua kebudayaan atau lebih, terutama sejauh manakah hal tersebut dapat menyebabkan perubahan, baik sosial maupun budaya. Sementara itu, juga disadari bahwa berubahnya unsur-unsur suatu kebudayaan tidak selalu dapat diartikan sebagai kemajuan, namun dapat pula dianggap sebagai kemunduran suatu masyarakat.

Untuk memahami pertemuan dua kebudayaan atau lebih di kalangan suku-suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia yang beranekawarna, perlu dikaji berbagai bentuk interaksi sosial mereka. Kelompok sosial dan lembaga kemasyarakatan di kalangan berbagai suku bangsa tersebut adalah bentuk struktural dari masyarakat, dan dinamikanya tergantung pada pola perilaku warganya dalam menghadapi suatu situasi tertentu.

Dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1957), Max Lerner meletakkan proses-proses sosial sebagai aspek dinamik dari hubungan-hubungan sosial. Sementara itu, dinamika suatu masyarakat tercermin dari perkembangan dan perubahan yang terjadi, baik sebagai akibat hubungan orang per orang, antarkelompok, maupun antara orang per orang dengan kelompok-kelompok. Berbagai bentuk interaksi sosial tersebut ditandai dengan terjadinya kontak dan komunikasi. Karenanya, pengetahuan tentang proses-proses sosial akan dapat dipakai untuk mengetahui perilaku apakah yang akan terjadi, terutama apabila terjadi perubahan-perubahan yang berakibat pada goyahnya sendi-sendi kehidupan lama (Gillin dan Gillin, 1954). Dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1957),

Robert E. Park mengatakan bahwa ada empat bentuk proses sosial yang penting, ialah konflik (*conflict*), akomodasi (*accomodation*), persaingan (*competition*), dan asimilasi (*assimilation*).

Untuk mengkaji masalah integrasi nasional, penggunaan istilah asimilasi di Indonesia kurang populer. Pada dekade 1960-an, konsepsi tersebut lebih diberikan arti sebagai perkawinan campur, terutama antara keturunan Cina dengan bumiputera. Agar tidak diartikan sebagai 'perkawinan campur', muncul padanan kata yang dipakai sebagai pengganti konsepsi asimilasi, ialah pembauran. Dalam kenyataannya, penggunaan istilah tersebut menjadi semakin tidak jelas, terutama jika dikaitkan dengan tujuan analisis, ruang lingkup, dan pendekatan atas permasalahan yang akan dipecahkan atau dipahami. Sementara itu, di kalangan antropologi dan sosiologi, ruang lingkup konsepsi tersebut juga masih dijumpai perbedaan, dan sering diartikan sama dengan konsepsi akulturasi. Sementara itu, dalam konteks di Indonesia, mengkaji masalah asimilasi di kalangan berbagai kebudayaan yang berbeda adalah suatu hal penting untuk menempatkan studi masalah integrasi nasional secara proporsional.

2. Asimilasi dan Akulturasi

Kajian tentang akulturasi yang dilakukan oleh semua ahli antropologi di masa lalu biasanya dilakukan berdasarkan suatu kerangka kerja yang hampir sama, baik di negara-negara persemakmuran, di Amerika Serikat maupun Amerika Latin. Untuk pertama kalinya, istilah akulturasi dijumpai dalam *Webster's Unbridged Dictionary* (1928) yang diartikan "... the approximation of one

*Doktor, Staf pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra, UGM.

yang diartikan "... the approximation of one human race of tribe to another in culture or arts by contact." Sampai dengan 1933, pengertian yang terkandung dalam istilah akulturasi sifatnya masih terlampau umum; misalnya yang tercantum dalam *Supplement New English Dictionary* (1933), yaitu "... the adaption and assimilation of an alien culture." Dalam edisi *Webster's Unbridged Dictionary* pada 1934, arti yang diberikan dalam istilah akulturasi mengalami perubahan, yaitu "... the approximation of one social group of people to another in culture or arts by contact; the transfer of culture elements from one social group of people to another."

Kajian tentang pertemuan dua kebudayaan atau lebih bukan hanya berlaku di kalangan *tribe* dari suatu ras tertentu, melainkan juga lebih menekankan pada suatu kelompok kemasyarakatan (*social groups*). Pada tahun-tahun berikutnya, pembatasan akulturasi mengandung pengertian yang lebih fleksibel, misalnya tampak dalam *New Standard Dictionary* (1936), ialah "... the importing of culture by one people to another."

Perhatian terhadap studi akulturasi di Amerika diperkirakan bermula dari reaksi terhadap suatu upaya rekonstruksi berdasarkan *memory culture*, atau lebih didasarkan atas suatu rekonstruksi yang hipotetis (Beals, 1962). Pada awal abad XX, perhatian terhadap kajian kebudayaan telah semakin pelik mengingat semakin luasnya persebaran kebudayaan dan semakin pesatnya perkembangan kebudayaan kontemporer. Sebagai akibatnya, para peneliti lebih tertarik untuk memusatkan perhatiannya terhadap studi tentang kontak-kontak kebudayaan, yaitu sejalan semakin pesatnya perkembangan kebudayaan kontemporer pada masa itu karena pengetahuan tentang hal tersebut dirasakan masih relatif terbatas.

Di Inggris minat terhadap fenomena pertemuan dua kebudayaan atau lebih banyak dilakukan oleh penganut fungsionalisme, tetapi umumnya juga bermula dari reaksi terhadap studi tentang *memory culture*. Rasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut di Inggris adalah juga disebabkan oleh (1) urgensi aplikasi praktis dari ilmu antropologi di daerah jajahan, dan (2) sebagai bagian dari reaksi akan keterbatasan akan pende-

katan fungsionalis. Akhirnya, kajian tentang hal tersebut diterapkan untuk suatu pendekatan yang lebih baik daripada yang biasanya dilakukan oleh para fungsionalis, yaitu mendekatinya dalam kerangka kerja dinamika perubahan. Amat cepatnya suatu perubahan yang terjadi dalam situasi kolonial seperti yang telah dikaji oleh para fungsionalis klasik B. Malinowski memperlihatkan bahwa dimensi waktu kurang mendapatkan perhatian.

Seperti halnya di Inggris, Perancis dan Belanda, kegunaan studi akulturasi lebih ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah praktis di daerah jajahan; juga merupakan faktor utama yang menyebabkan semakin populernya kajian ini. Sementara itu, di Amerika perkembangan pesat dari studi akulturasi adalah lebih berkaitan dengan timbulnya berbagai masalah sosial sebagai akibat masa depresi ekonomi (*malaise*). Untuk itu, B. Malinowski mengatakan "... a new branch of anthropology must sooner or later be started: the anthropology of the changing Native".

Dalam ilmu sosial, istilah asimilasi dan akulturasi seringkali dipergunakan tumpang-tindih. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa istilah asimilasi lebih sering dipakai oleh para ahli sosiologi, sedangkan istilah akulturasi lebih sering digunakan oleh ahli antropologi (Gordon, 1964: 61); dan lebih merupakan istilah spesifik yang lazim dipakai para ahli antropologi di Amerika (Herskovits, 1958). Di kalangan sebagian mahasiswa di Jerman, lapangan studi akulturasi lebih dikenal dengan kajian tentang perubahan kebudayaan, sedangkan di Inggris lebih populer dengan studi perihal pertemuan dua kebudayaan atau lebih.

Pada dasarnya, pengertian yang terkandung dalam istilah asimilasi maupun akulturasi, selain mengandung pengertian yang sama, juga menunjukkan ada dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, pembatasan asimilasi yang dibuat oleh Ernest W. Burgess dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1957), antara lain mengatakan "... a process of interpretation and fusion in which persons and groups acquire the memories, sentiments, and attitude of other persons or groups, and, by sharing their experience and history, are incorporated with them in a

common cultural life." Lebih lanjut Ernest W. Burgess mengatakan bahwa dalam kontak-kontak sosial tersebut yang diawali dengan terjadinya interaksi yang bersifat pribadi dan mendalam, terutama, akan berguna untuk meletakkan dasar-dasar dari suatu hubungan lebih lanjut.

Selanjutnya, diterimanya secara bulat akulturasi sebagai lapangan studi disiplin antropologi di Amerika Serikat dapat dikatakan masih relatif baru. Untuk pertama kalinya, kajian tentang akulturasi mulai dikemukakan pada pertemuan tahunan dari *American Anthropological Association* tahun 1930. Berdasarkan perumusan yang dibuat oleh Robert Redfield, Ralph Linton, dan Melville J. Herskovits dari Sub Komite Akulturasi dalam kongres *Social Science Research Council* 1930, yang dimuat sebagai "Memorandum for the Study of Acculturation", *American Anthropologist*, Vol.38 No.1 (Januari-Maret 1936), hlm.136; dikatakan bahwa akulturasi adalah "... comprehends those phenomena which result when groups of individuals having different culture comes into continous first hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups".¹

Jika diamati, kedua pembatasan tersebut berisikan suatu pengertian mengenai terjadinya pertemuan orang-orang atau perilaku budaya. Sebagai akibat pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling mempengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka saling berubah bentuk. Yang tampak membedakannya adalah tidak ditemukannya ciri-ciri struktural dalam pembatasan akulturasi. Dalam pembatasan asimilasi, hubungan yang bersifat sosio-struktural tercermin dari kata-kata "... sharing their experience" dan "... incorporated with in in a common cultural life".

Terwujudnya rumusan dari subkomite akulturasi tersebut di atas tidak terlepas dari perkembangan ruang lingkup dan objek yang selalu mengalami perubahan, terutama sejak awal abad XX. Sebagai akibat pengaruh Ero-Amerika, bangsa-bangsa primitif mulai menghilang; sementara itu, sebagai akibat perkembangan yang terjadi di Amerika, konsepsi asimilasi juga mengalami perubahan karena mulai dikaitkan dengan aspek politik.

Pada masa-masa mendatang konsepsi akulturasi masih selalu dicoba untuk disempurnakan, misalnya, dilakukan oleh Herskovits dalam *Outline for the Study of Acculturation* (Herskovits, 1958).² Lebih lanjut Herskovits (1958:10) berpendapat bahwa makna yang terkandung dalam akulturasi berbeda dengan perubahan kebudayaan (*cultural change*). Akulturasi hanyalah merupakan salah satu aspek dari perubahan kebudayaan, sedangkan akulturasi merupakan salah satu tahapan dari asimilasi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa akulturasi juga berbeda dengan difusi (*diffusion*), dan semua bentuk akulturasi mengandung pengertian tersebut, terutama dalam konteks suatu hubungan tanpa melalui kontak fisik dari para pendukung suatu kebudayaan. Menurut Herskovits (1948), difusi merupakan *achieved cultural transmission* sedangkan akulturasi lebih *cultural transmission in process*.

Lebih lanjut Arnold M. Rose (1956) juga menjelaskan perbedaan antara asimilasi dan akulturasi. Ia menyatakan bahwa asimilasi adalah "... the adoption of the culture of another social group a complete extent that the person or group no longer has any characteristic identifying him with his former culture and no longer has any particular loyalties to his former culture. Or, the process leading to this adoption." Atas dasar pembatasan tersebut maka *leading to this adoption* atau suatu adopsi kebudayaan asing yang demikian luas dan lengkap lebih tepat disebut dengan asimilasi, sedangkan akulturasi dikatakannya hanya, ... *the adoption by a person or group of the culture of another social group*" adalah akulturasi. Loyalitas mereka terhadap kebudayaan asal semakin kecil, dan akhirnya kelompok tersebut mengidentifikasi dirinya ke dalam suatu kebudayaan baru.

Sebagai akibat perkembangan yang terjadi pada masyarakat di Amerika, konsepsi asimilasi mulai dikaitkan dengan aspek politik. Karenanya, Robert E. Park (1957:281) memberikan istilah sebagai asimilasi sosial, yaitu "... the process or processes by which people of diverse racial origins and different cultural heritage, accupying a common territory, achieve a cultural solidarity sufficient at least to sustain a national existence." Para migran di Amerika dianggap telah ber-

asimilasi apabila mereka itu secepatnya dapat menggunakan bahasa Inggris dan berperan serta dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan politik tanpa menyebabkan timbulnya prasangka. Oleh karenanya, dalam salah satu tulisannya, Milton M. Gordon (1964) menunjuk adanya tujuh variabel yang harus dikaji dalam asimilasi. Ketujuh variabel tersebut adalah sebagai berikut.

1. Asimilasi budaya atau asimilasi perilaku atau lazim disebut dengan akulturasi; terjadinya perubahan pola-pola kebudayaan ke arah penyesuaian terhadap kebudayaan kelompok mayoritas.
2. Asimilasi struktural, yaitu dalam skala besar mereka memasuki berbagai jenis perkumpulan, klik, dan kelembagaan kelompok mayoritas, terutama pada *level* dasar atau paling bawah.
3. Asimilasi perkawinan atau amalgamasi (*amalgamation*), yaitu terjadinya perkawinan campuran dalam skala besar.
4. Asimilasi identifikasi, yaitu berkembangnya perasaan sebagai satu bangsa seperti halnya yang dimiliki oleh kelompok mayoritas.
5. *Attitude receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak timbulnya suatu sikap berprasangka.
6. *Behavior receptional assimilation*, yaitu suatu asimilasi yang dicerminkan oleh tidak munculnya suatu sikap diskriminasi.
7. Asimilasi yang dikaitkan dengan status kewarganegaraan atau *civic assimilation*, antara lain, yang terwujud dalam bentuk tidak adanya konflik nilai dan konflik kekuatan.

Dalam hal ini, suatu asimilasi mengharuskan para migran untuk menyesuaikan dirinya pada kelompok kebudayaan yang didatangi (*host society*). Ini berarti bahwa kebudayaan golongan mayoritaslah yang dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan orang-perorangan atau suatu kelompok dalam menyesuaikan dirinya. Konsepsi ini sesuai dengan pandangan Arnold M. Rose di atas, yaitu identifikasi dan loyalitas mereka terhadap kebudayaan asal semakin kecil

dan akhirnya mereka loyal dan mengidentifikasi dirinya ke dalam kebudayaan baru.

Sementara itu, Frederich E. Lumley dalam *Dictionary of Sociology* mengatakan bahwa asimilasi adalah "*The process by which different cultures, or individuals or groups representing different cultures, are merged into a homogenous units*". Ini berarti bahwa asimilasi merupakan *two way traffic*. Karenanya, dalam suatu asimilasi akan dihasilkan suatu kebudayaan baru (*melting-pot*).

3. Asimilasi dalam rangka Integrasi Nasional

Asimilasi sebagai salah bentuk proses-proses sosial erat kaitannya dengan proses dan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Ernest W. Burgess dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1957) mengatakan bahwa akomodasi tidak selalu dapat menciptakan asimilasi, terutama apabila kontak yang intensif dan mendalam tidak terjadi. Akomodasi lebih merupakan "*... the process of making social adjustment to conflict situations by maintaining social distances between groups and persons, ... is the process by which cultures and personalities interpenetrate and fuse.*"

Sesuatu yang terjadi dalam akomodasi adalah "*... old habits are broken-up, and a new coordination are made*" (Balwin, 1957). Ini berarti bahwa selama proses penyesuaian berlangsung, berbagai konflik berusaha untuk dihindari, dan berbagai kebiasaan lama diupayakan diubah untuk disesuaikan sehingga mereka yang saling terlibat memperoleh sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang baru. Lebih lanjut J. Mark Malwin mengatakan bahwa akomodasi merupakan "*... the process of making social adjustment to situations by maintaining social distances between groups and persons which might otherwise come into conflict*". Karenanya, akomodasi harus dibedakan dengan adaptasi, sekalipun keduanya merupakan bentuk dari *adjustment*. Istilah adaptasi lebih sering dipakai dalam konteks perubahan struktural yang disebabkan oleh variasi dan seleksi biologis. Sebaliknya, yang tercakup dalam pengertian akomodasi adalah erat kaitannya dengan perubahan fungsio-

nal, misalnya berubahnya kebiasaan, tatacara, dan adat-istiadat seseorang atau sekelompok orang.

Ruang lingkup pengertian akomodasi juga dapat pula lebih dipahami melalui pembatasan yang dibuat oleh Hornell Hart dalam *Dictionary of Sociology* (1942); ialah "(1) Any social process, whether conscious or unconscious which consists in the alteration of functional relations between personalities and groups so as to avoid, reduce or eliminate conflict and to promote reciprocal adjustment (q.v.), provided that the altered behavior pattern is transmitted by social learning rather than biological heredity; and (2) the social relationships which result from this process. Among the varieties (or methods) of accomodation most often mentioned are arbitration, compromise, concialiation, conversion, subordination, and toleration".

Berdasarkan pembatasan tersebut, di satu pihak akomodasi berarti menunjuk pada suatu proses, juga menunjuk pada suatu keadaan. Akomodasi sebagai suatu proses ditandai oleh upaya menciptakan keseimbangan dan menjauhkan berbagai hal yang dapat menimbulkan konflik. Ada kalanya upaya tadi dilakukan secara sadar, tetapi juga dapat dilakukan secara paksa. Suatu akomodasi yang menunjuk pada suatu keadaan ditandai oleh terciptanya keseimbangan hubungan antara orang per orang maupun antarkelompok. Akhirnya, hasil dari suatu akomodasi dapat berupa *arbitration, compromise, concialiation, conversion, subordination, ataupun toleration*".

Selanjutnya, akomodasi sebagai suatu proses dan yang menunjuk sebagai suatu keadaan tertentu erat terkait dengan kompromi dan konversi. Dalam *Dictionary of Sociology* (1944), Frederich E.Lumley memberikan batasan kompromi sebagai "An agreement reached by mutual concession; conciliatory process consisting of the exchange of value until parties are more less satisfied at least more of them satisfied than before the exchange the characteristic". Mengingat hasil akomodasi dalam bentuk kompromi belum tentu memuaskan kedua belah pihak, antara lain karena masing-masing memiliki dasar argumentasi dan pandangan yang berbeda, akan mengakibatkan hubungan intensif dan mendalam

berjalan tersendat. Untuk mengatasinya, aspek yang menghambat harus segera diupayakan diketahui. Sementara itu, dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences* dijelaskan bahwa dalam suatu konversi "... change of heart, an emotional regeneration, typically sudden in its advent or consummation, affecting radically the outlook, the inner adjustment and the habits of life an individual." Mereka harus mengubah perasaan dan perilakunya sehingga asimilasi dapat diwujudkan, dan akhirnya berbagai sumber konflik dapat dieliminasi.

Secara garis besarnya, pengertian yang tercakup dalam konsep konversi menurut *Encyclopaedia of the Social Sciences* (1957) menunjuk "... change of heart, an emotional regeneration, typically sudden in its advent or consummation, affecting radically the outlook, the inner adjustment and the habits of life an individual." Tanda-tanda awal dimulainya konversi adalah munculnya sikap mendua, dan terjadinya perubahan pada salah satu unsur-unsur kebudayaan atau lebih. Untuk menyesuaikan kepribadian, suatu akomodasi dalam bentuk konversi amat menekankan arti penting mengadopsi secara sukarela berbagai pola dan etos dari *out-group*. Apabila hal tersebut dapat terjadi, sikap mendua akan semakin berkurang, dan bahkan hilang sama sekali; yang akhirnya *in-group* akan terlibat secara menyeluruh dengan kebudayaan *out-group*. Ini berarti, berbagai sikap dan sistem nilai lama yang dimilikinya telah dapat diganti oleh sikap dan sistem nilai yang baru. Sekalipun demikian, kuatnya ikatan terhadap akar kebudayaan suku bangsa mereka adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari seperti ungkapan Horace Kallen yang dikutip oleh Milton M.Gordon (1964:145), yaitu "Men may change their clothes, their wife, their religion, their philosophies, to a greater or lesser extent; their cannot change the grandfather." Timbulnya ungkapan tersebut erat kaitannya dengan suatu stereotipe yang lazim dikenakan terhadap orang Yahudi, yaitu 'sekali Yahudi tetap Yahudi'. Meskipun orang Yahudi hidup tersebar di berbagai negara, mengingat kuatnya ikatan perasaan mereka terhadap keluarga, akar kebudayaan Yahudi sangat mewarnai sepak terjang kehidupannya (Epstein, 1978:139).

Lebih lanjut juga perlu disadari bahwa dalam suatu interaksi sosial, dalam kenyataannya berbagai suku-bangsa yang ada tidak berada pada suatu posisi yang sama. Ada suku-suku bangsa yang menduduki suatu posisi sebagai kelompok superordinat, sebaliknya ada pula suku-bangsa yang berada pada kelompok subordinat. Adakalanya, kelompok superordinat juga merupakan kelompok dominan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan hak-hak istimewa (*privileges*) tertentu. Oleh karena itu, untuk lebih memahami bentuk-bentuk kehidupan dalam suatu masyarakat yang majemuk, Schermerhorn (1970:13) memberikan contoh model paradigma. Melalui model paradigma tersebut tampak bahwa ruang lingkup kelompok dominan dan subordinat didasarkan atas dua dimensi, ialah *size* (jumlah) dan *power* (kekuasaan). Paradigma di bawah ini dapat dipakai sebagai pengetahuan untuk memahami berbagai bentuk hubungan dalam masyarakat majemuk; bukan hanya yang multi-etnik tetapi juga multi-golongan.

Paradigma Kelompok Dominan dan Subordinat

	Kelompok Dominan		
	Jml Kekuasaan		
Kelompok A	+	+	Gol. mayoritas
Kelompok B	-	+	Elite

	Kelompok Subordinat		
	Jml Kekuasaan		
Kelompok C	+	-	Subjek massa
Kelompok D	-	-	Gol. minoritas

Untuk mewujudkan suatu integrasi, harus diciptakan harmoni dari berbagai kesatuan yang potensial bagi munculnya konflik seperti dikemukakan oleh Amey E. Watson (1944) dalam *Dictionary of Sociology*, antara lain "*That social process tends to harmonize and unify diverse and conflicting units, whether those units be elements of personality, individuals, groups or larger social aggregations.*" Suatu kehidupan yang harmoni akan memungkinkan " ... *bringing together of the disparate parts of a society into a more integrated whole, or to make*

out of many small societies a closer approximation of the one nation" (Watson, 1944). Ini berarti bahwa kedua definisi tersebut menekankan bahwa dalam suatu integrasi nasional terkandung *cultural differentiations* atau *Bhinneka Tunggal Ika*.

Schermerhorn (1970) mengingatkan agar dalam mengkaji masalah integrasi nasional hendaknya mengaitkan konteks campuran dari sistem kemasyarakatan suatu komunitas. Ini berarti bahwa aspek sosial-budaya dan politik yang tercakup dalam konsepsi integrasi harus pula dipertimbangkan; misalnya terintegrasinya kebudayaan suku-suku bangsa tanpa harus menghilangkan ciri-ciri kebudayaan dari setiap suku bangsa. Karenanya, paling tidak studi tentang integrasi nasional mencakup tiga masalah utama, ialah (1) integrasi sebagai masalah yang erat kaitannya dengan legitimasi; (2) integrasi sebagai masalah yang erat kaitannya dengan konkurensi kebudayaan; dan (3) integrasi sebagai masalah yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian pandangan, terutama yang menyangkut posisi suatu suku bangsa atau golongan subordinat.

Di Indonesia, misalnya, selain terdapat berbagai suku-bangsa yang memiliki suatu wilayah tertentu di Nusantara, juga terdapat kolektiva yang diklasifikasikan sebagai golongan minoritas, yaitu Cina, India, dan Arab. Guna mewujudkan asimilasi dalam rangka suatu integrasi nasional, terdapat dua aliran pemikiran, yaitu apakah asimilasionis ataukah pluralis. Kesemuanya itu tidak terlepas dari perkembangan peristiwa yang terjadi di berbagai bangsa yang multi-etnik. Kebijakan asimilasi pada suatu negara tergantung pada kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan; terutama untuk menemukan pola-pola ideal manakah yang dapat dipakai untuk mempersatukan keanekaragaman dalam suatu wadah negara kebangsaan tertentu.

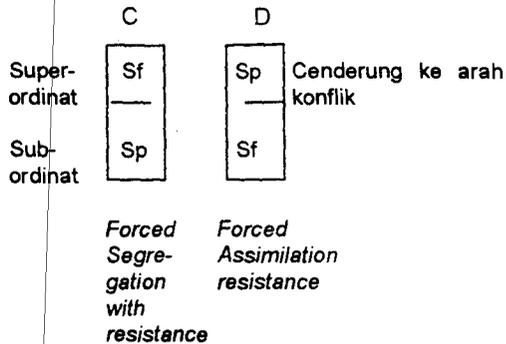
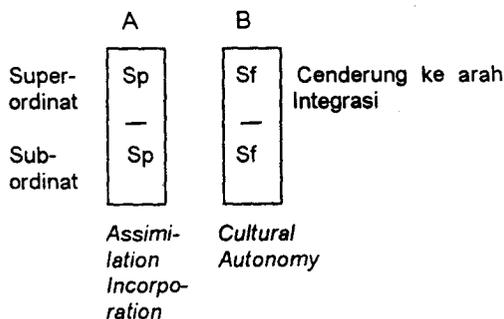
Louis Wirth (1945:347) mengatakan bahwa kebijakan yang bersifat asimilasionis lebih menekankan agar para anggota minoritas di suatu negara bergabung ke dalam masyarakat lebih luas dengan cara melarung kebudayaan mereka dan mengharuskannya mengadopsi sistem nilai dan gaya hidup kelompok dominan atau superordinat. Sebaliknya, yang bersifat pluralis menghen-

daki agar kelompok dominan lebih bersikap toleran terhadap kebudayaan kelompok subordinat, atau suku bangsa dan golongan minoritas tetap diperkenankan mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing.

Jika kedua aliran tersebut dicermati, ada perbedaan implikasi yang ditimbulkan, terutama jika dikaitkan dengan sejauh manakah kelompok superordinat mampu menerapkan dan memperkenankan kelompok subordinat melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, timbul pula suatu pertanyaan lain, yaitu apakah kelompok superordinat begitu saja percaya bahwa suku bangsa dan golongan minoritas akan berasimilasi, ataukah mereka akan tetap mempertahankan kebudayaannya. Apabila itu terjadi, apakah kelompok dominan dapat menerima kemungkinan berbagai hal kontradiktif yang akan ditimbulkan oleh kelompok subordinat tersebut. Oleh karenanya, jika berbagai hal tadi dapat diterima, suatu integrasi nasional akan berjalan dengan baik, dan sebaliknya, jika tidak, akan timbul konflik, baik secara terbuka maupun yang bersifat laten.

Berbagai hal lain yang juga penting diperhatikan dalam mengidentifikasi suatu integrasi adalah di manakah posisi kelompok superordinat. Dalam hal ini, ada dua konsep utama yang dapat dipakai sebagai model untuk analisis, yaitu apakah cenderung itu akan bersifat sentripetal (Sp) ataukah sentrifugal (Sf).

Paradigma Orientasi Sentripetal (Sp) dan Sentrifugal (Sf)



Suatu kebijakan yang cenderung bersifat sentripetal biasanya lebih terkait dengan hal-hal yang bersifat kultural, misalnya dalam bentuk diterimanya sistem nilai dan gaya hidup yang lazim berlaku di masyarakat. Selain itu, dapat pula dalam bentuk semakin meningkatnya partisipasi mereka di berbagai kelompok perkumpulan dan kelembagaan. Selanjutnya, suatu kebijakan yang cenderung bersifat sentrifugal adalah apabila ada keinginan di kalangan subordinat untuk memisahkan diri dari kelompok dominan atau dari berbagai ikatan yang lazim terdapat di masyarakat. Secara kultural, biasanya hal itu terjadi karena kelompok subordinat masih sering dan masih tetap ingin menjaga berbagai tradisi, sistem nilai, bahasa, agama, pola-pola rekreasi mereka, dan lain sebagainya. Untuk melindungi berbagai hal tersebut, diperlukan persyaratan struktural, antara lain, tampak dari kebiasaan melakukan perkawinan di kalangan kelompok sendiri, mendirikan perkumpulan yang terpisah atau eksklusif; dan bahkan mereka ini lebih memusatkan dirinya pada suatu lapangan pekerjaan tertentu yang eksklusif terhadap *out-group*. Untuk melihat adanya perbedaan dalam tingkat analisis, yang pertama (sentripetal) disebut dengan asimilasi, sedangkan yang kedua (sentrifugal) adalah inkorporasi (Schermmerhorn, 1970).

4. Penutup

Suatu integrasi nasional dapat diupayakan melalui *assimilation incorporation* ataupun melalui *cultural autonomy*. Sementara itu, asimilasi merupakan *the last product*, yang mampu menciptakan suatu keadaan bagi terciptanya "... a cultural solidarity sufficient at least to sustain a national exis-

tence." Untuk menuju integrasi nasional yang kuat, diperlukan "old habits are broken-up, and a new coordination are made." Karena asimilasi lebih merupakan suatu *political policy*, apakah didasarkan atas paham asimilasionis ataukah pluralis; kesemuanya akan tergantung pada kesepakatan bersama di kalangan warganegara suatu bangsa; demikian pula apakah bersifat sentripetal ataukah sentrifugal.

Akhirnya, suatu integrasi nasional juga mengandung aspek psikologis, antara lain, berkaitan dengan tingkat kepuasan tertentu dari suatu suku-bangsa atau golongan yang terlibat dalam asimilasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional, apakah itu hasil dari suatu *agreement* (permutakatan) ataukah sekedar merupakan *congruency* atau persesuaian; terutama yang berkaitan apakah itu dihasilkan dari kebijakan yang bersifat sentripetal ataukah sentrifugal. Apabila terjadi *disagreement* atau *discrepancy* (ketidaksesuaian), berarti kelompok superordinatlah yang menang atas kebijakan yang bersifat sentripetal; sementara kelompok subordinat lebih menghendaki yang bersifat sentrifugal. Jika hal ini terjadi, akan timbul konflik yang dapat menyebar luas.

¹Pembatasan tersebut mendapatkan berbagai kritik, sekalipun demikian banyak pula yang tetap berpegang pada definisi dengan disertai beberapa catatan untuk memahaminya, terutama harus selalu dikaitkan dengan keseluruhan dari isi memorandum. Menurut Beals (1962), paling tidak ada lima hal yang masih sulit untuk ditafsirkan adalah (1) apa sebenarnya pengertian *continous first-hand contact*; (2) apa pengertian dari *groups of individuals*; (3) bagaimanakah hubungan antara akulturasi dengan konsep perubahan kebudayaan dan difusi; (4) bagaimanakah hubungan antara akulturasi dan simlasi; dan (5) apakah akulturasi sebagai suatu proses ataukah menunjukkan pada suatu keadaan (*a process or a condition*).

²Dalam *Outline for the Study of Acculturation* yang ditulis oleh Herskovits (1958), dikemukakan ada sejumlah pokok yang perlu mendapatkan perhatian, ialah:

1. Pembatasan akulturasi.
2. Pendekatan, antara lain meliputi (a) daftar materi studi akulturasi, (b) cara mengklasifikasikan, (c) teknik analisis hasil studi.

3. Cara menganalisis akulturasi, antara lain meliputi (a) tipe suatu kontak dalam akulturasi, (b) gambaran situasi dalam suatu masyarakat yang sedang mengalami akulturasi, dan (c) proses akulturasi.
4. Seleksi dan mekanisme psikologis yang berkaitan dengan unsur-unsur integrasi dalam suatu akulturasi, yaitu meliputi (a) peranan individu, (b) tipe-tipe kepribadian pihak yang menerima maupun yang menolak unsur-unsur budaya baru, (c) perbedaan dalam menyeleksi dan menerima unsur-unsur budaya daru yang dikaitkan dengan jenis kelamin, perbedaan lapisan sosial, perbedaan pekerjaan, dan perbedaan kepercayaan, (d) gambaran keramah-tamahan seseorang sebagai akibat rekonsiliasi dalam kebudayaan yang baru, dan hal ini dianggap sebagai faktor integratif dari unsur-unsur kebudayaan baru, (e) konflik fisik sebagai akibat upaya rekonsiliasi perilaku sosial tradisional, termasuk berbagai perbedaan sangsi-sangsi sosial.
5. Hasil dari suatu akulturasi, apakah berupa *acceptence*, *adaptation*, ataukah *reaction*.

DAFTAR PUSTAKA

- Beals, Ralp, 1962, "Acculturation", *Anthropology Today: Selections*, Sol Tax (ed.), Chicago, The University of Chicago Press, Hlm.375-395.
- Epstein, A.L., 1978, *Ethos and Identity: Three Studies in Ethnicity*, London, Tavistock Publication.
- Gillin, J.I. and Gillin J.P., 1954, *Cultural Sociology*, New York, The Macmillan Company.
- Gordon, M.M., 1964, *Assimilation in American Life*, Oxford University Press, New York.
- Herskovits, M.J., 1948, *Man and His Work*, A.A. Knopf, New York

Herkovits, M.J., 1958, *Acculturation: The Study of Culture Contact*, New York, Peter Smith.

Martin, J.G. and C.W.Franklin, 1973, *Minority Group Relations*, Charles E. Merrill Publishing Company, Ohio.

Schermerhorn, R.A., 1970, *Comparative Ethnic Relations: A Framework of Theory and Research*, Random House, New York.

Wirth, L., 1945, "The Problem of Minority Groups", *The Science of Man in the World Crisis*, R.Linton (ed.), New York, Columbia University Press, Hlm.347-372.

Wriggins, Howard, 1966, "National Integration", *Modernization: The Dynamica of Growth*, Myron Weiner (ed.), Cambridge, Voice of American Forum Lectures, Hlm. 197-207.